

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

VALUE FOR MONEY AUDIT



Anggota Kelompok



Arnesta Az Zahra
2313031066



Aulia Dzidni Nafissa
2313031073

Value For Money

Apa itu Value For Money?

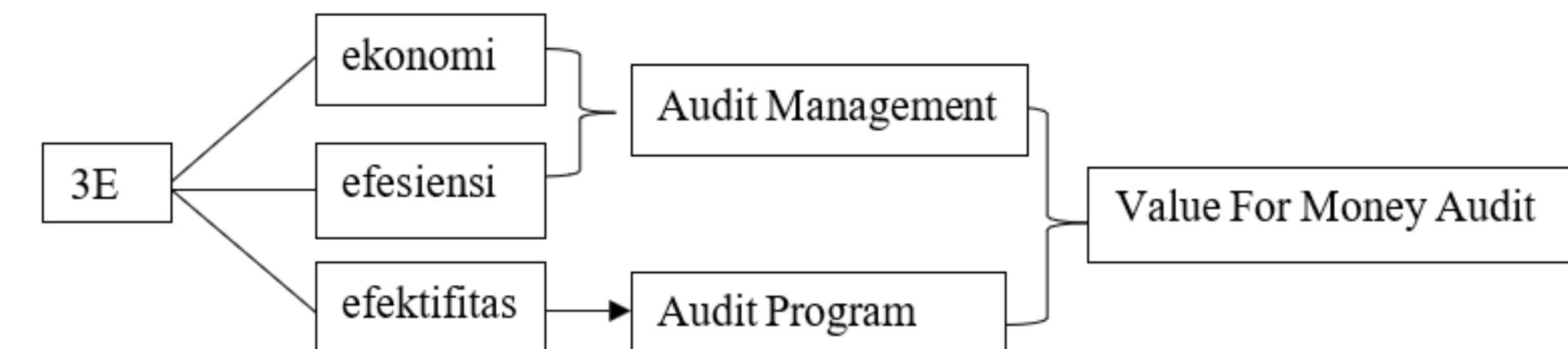
Value for money adalah pusat untuk penilaian pelaksanaan di asosiasi pemerintah dan area publik. Untuk menggambarkan secara akurat pelaksanaan pemerintahan yang sebenarnya, sumber informasi, hasil, dan hasil semua perlu diperhitungkan secara terkoordinasi untuk disurvei. Karena kinerja pemerintah harus memperhitungkan input, output, dan proses, maka nilai uang menjadi landasan untuk mengukur kinerja di organisasi sektor publik (N. C.F. Sari, 2014).





Karakteristik Value For Money

Ada audit kinerja kegiatan pemeriksaan terhadap pengelolaan organisasi sector public terutama di dasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efesiensi dan efektivitas



Konsep Value For Money

Indikator pengukuran kinerja pada prinsip value for money terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Ekonomis

Ekonomis adalah ukuran relatif. Penerimaan kualitas dan kuantitas input tertentu dengan harga terendah di sebut ekonomis. Pembelian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas tertentu dengan harga terbaik (spending less) merupakan implementasi yang ekonomis (Basri, 2018).

Pengukuran dengan indikator ekonomis memerlukan data berupa anggaran belanja dan realisasi belanja.

Konsep Value For Money

1. Ekonomis

Rumus Rasio Ekonomis

$$\text{RASIO EKONOMIS} = \frac{\text{REALISASI BELANJA}}{\text{ANGGARAN BELANJA}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah kriteria ekonomis dalam penilaian kinerja keuangan:

- Jika rasio ekonomis kurang dari 100% ($X < 100\%$) artinya ekonomis.
- Jika rasio ekonomis sama dengan 100% ($X = 100\%$) artinya ekonomis berimbang atau cukup ekonomis.
- Jika rasio ekonomis lebih dari 100% ($X > 100\%$) berarti tidak ekonomis.

Konsep Value For Money

Indikator pengukuran kinerja pada prinsip value for money terbagi menjadi tiga yaitu:

2. Efisiensi

Efisiensi dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaan sumber daya diminimalkan dan hasil dimaksimalkan. Efisiensi berkaitan dengan pencapaian output yang maksimal untuk input yang diberikan (Meitri, 2022)

Konsep Value For Money

2. Efisiensi

Rumus Rasio Efisiensi:

$$\text{RASIO EFESIENSI} = \frac{\text{RASIO BELANJA}}{\text{RASIO PENDAPATAN}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah kriteria efisiensi dalam penilaian kinerja keuangan:

- Jika rasio efisiensi kurang dari 100% ($X < 100\%$) artinya efisien;
- Jika rasio efisiensi sama dengan 100% ($X = 100\%$) artinya efisiensi berimbang atau cukup efisien;
- Jika rasio efisiensi lebih dari 100% ($X > 100\%$) berarti tidak efisien.

Konsep Value For Money

Indikator pengukuran kinerja pada prinsip value for money terbagi menjadi tiga yaitu:

3. Efektivitas

Efektivitas adalah hubungan output dan maksud yang dituju dengan mengukur seberapa baik kebijakan, prosedur dan tingkat output dalam memenuhi tujuan yang sudah ditetapkan (P.A. Erawan, et al, 2018).

Suatu kegiatan operasional dapat dikatakan efektif jika program atau kegiatan mencapai tujuan dan tujuan akhir dari kebijakan.

Konsep Value For Money

3. Efektivitas

Rumus Rasio Efisiensi:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{anggaran Belanja Rasio Ekonomis}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah kriteria efektivitas dalam penilaian kinerja keuangan:

- Jika rasio efektivitas kurang dari 100% ($X < 100\%$) artinya tidak efektif.
- Jika rasio efektivitas sama dengan 100% ($X = 100\%$) artinya efektif berimbang atau cukup efektif.
- Jika rasio efektivitas lebih dari 100% ($X > 100\%$) berarti efektif

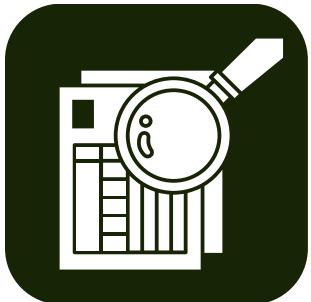
Tujuan Value For Money Audit

Tujuan Value For Money Audit adalah untuk meningkatkan akuntabilitas Lembaga sector public dan untuk perbaikan kinerja pemerintah.

Audit kinerja yang meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedur nya.



Audit kinerja pemerintah daerah dalam konteks otonom daerah



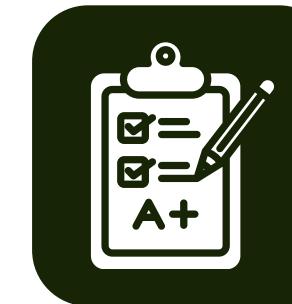
1. Pengawasan

mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak luar eksekutif (yaitu masyarakat dan DPR/DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan.



2. Pengendalian (control)

adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif atau pemerintah untuk menjamin dilaksanakannya sistem atau kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

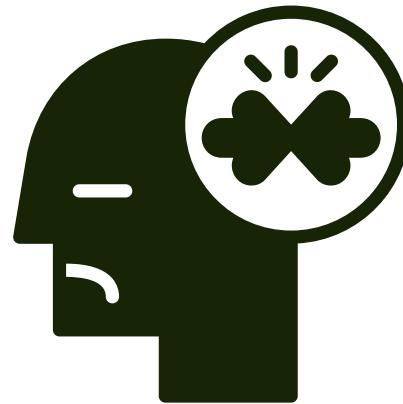


3. Pemeriksaan (audit)

merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan.

Permasalahan audit kinerja lembaga pemerintah di Indonesia

Kelemahan-kelemahan dalam melakukan audit pemerintahan di Indonesia meliputi:



Tidak tersedianya indikator kinerja (performance indicator) yang memadai sebagai dasar untuk mengukur kinerja pemerintah daerah.

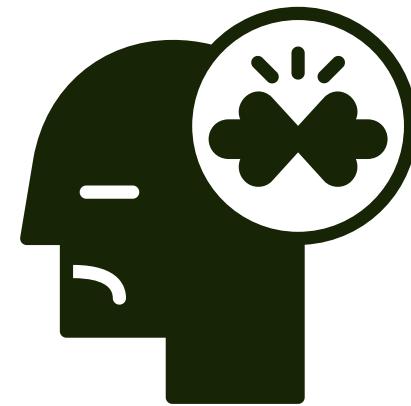


Banyak lembaga pemeriksa fungsional yang overlapping satu dengan yang lainnya yang menyebabkan pelaksanaan pengauditan tidak efisien dan tidak efektif.

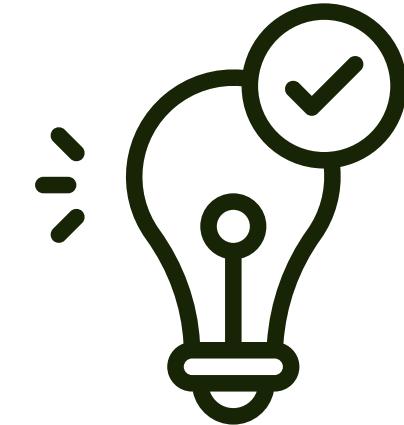


Permasalahan audit kinerja lembaga pemerintah di Indonesia

Dengan adanya masalah tersebut diatas, maka diambil berbagai cara untuk menanggulangi masalah tersebut diantaranya:



Dalam mengatasi masalah tidak tersedianya indikator kinerja yang memadai dan belum adanya Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah yang baku adalah dengan menetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sebagai pedoman bagi eksekutif daerah dalam menjalankan tugasnya.



Untuk mengatasi masalah banyaknya lembaga pemeriksaan fungsional yang overlapping satu dengan yang lainnya adalah dengan mengadakan reposisi terhadap lembaga audit yang ada



MARI BERTANYA!



Studi Kasus

Pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020–2021, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) secara besar-besaran untuk tenaga medis di seluruh Indonesia. Nilai proyek ini mencapai sekitar Rp 3,03 triliun.

Karena sifatnya darurat, banyak pengadaan dilakukan dengan penunjukan langsung (direct appointment) dan tanpa proses lelang terbuka. Berdasarkan hasil penelusuran dan pemeriksaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ditemukan indikasi bahwa beberapa vendor yang ditunjuk tidak memenuhi kriteria kelayakan, bahkan sebagian pengadaan dilakukan tanpa perencanaan kebutuhan yang jelas.

Beberapa laporan juga menunjukkan bahwa sebagian APD datang terlambat, tidak sesuai spesifikasi, atau didistribusikan tidak merata, terutama ke rumah sakit di daerah terpencil.

Pertanyaan:

1. Apakah pengadaan APD senilai Rp 3,03 triliun dengan metode penunjukan langsung sudah mencerminkan prinsip ekonomis? Mengapa? Jelaskan dari sisi positif dan negatifnya!
2. Dalam kondisi darurat seperti pandemi, menurut Anda manakah yang lebih penting: kecepatan pengadaan atau kehematan biaya? Berikan alasan Anda!



TERIMAKASI

Pengen foya-foya, tapi yang berlimpah malah tugas ku, sekian trims..

